

DINAMIKA PERJALANAN DINASTI POLITIK DI INDONESIA

**Muhammad Annizar Maulana¹, Revi Maulida², Syahrul Maghfiroh³, Tia
Heni Viana⁴**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05040421100@uinsby.co.id

ABSTRAK

Dinamika perjalanan dinasti politik di Indonesia mencerminkan evolusi sistem politik dalam konteks sejarahnya. Penelitian ini menggambarkan perkembangan dinasti politik dari masa kolonial hingga era modern, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan dan transformasi dinasti politik. Dengan menggunakan pendekatan historis dan analisis kontemporer, studi ini menelusuri jejak dinasti politik dalam perubahan kebijakan, struktur kekuasaan, dan partisipasi politik. Penelitian ini menyoroti kelembagaan partai politik dalam aspek demokrasi, wajah dinasti politik di Indonesia dan analisis keberadaan dinasti politik di Indonesia dalam aspek demokrasi. Dari konsolidasi kekuasaan kolonial hingga kemerdekaan, dinasti-dinasti politik memainkan peran penting dalam pembentukan negara dan konstitusi. Analisis ini juga mengeksplorasi dampak dinasti politik terhadap stabilitas politik dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan memperhatikan dinamika suksesi dalam dinasti politik, penelitian ini mengidentifikasi pola pewarisan kekuasaan dan pengaruh dinasti politik terhadap kebijakan publik. Selain itu, studi ini mengevaluasi respons masyarakat terhadap fenomena dinasti politik, termasuk persepsi terhadap keadilan politik dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang evolusi dinasti politik di Indonesia, menyelidiki dampaknya terhadap perkembangan politik dan sosial. Implikasi temuan ini dapat membantu merancang kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik, menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan demokrasi di masa depan.

Kata Kunci: *Dinamika, Dinasti Politik, Indonesia*

ABSTRACT

The dynamics of political dynasties in Indonesia reflect the evolution of the political system in its historical context. This research describes the development of political dynasties from the colonial period to the modern era, identifying factors that influence the continuity and transformation of political dynasties. Using a historical approach and contemporary analysis, this study traces the traces of political dynasties in policy changes, power structures and political participation. This research highlights political party institutions in the democratic aspect, the face of political dynasties in Indonesia and analyzes the existence of political dynasties in Indonesia in the democratic aspect. From the consolidation of colonial power to independence, political dynasties played an important role in the formation of states and constitutions. This analysis also explores the impact of political dynasties on political stability and the development of democracy in Indonesia. By paying attention to the dynamics of succession in political dynasties, this research identifies patterns of inheritance of power and the influence of political dynasties on public policy. In addition, this study evaluates society's response to the phenomenon of political dynasties, including perceptions of political justice and economic growth. This research provides a comprehensive picture of the evolution of political dynasties in Indonesia, investigating their impact on political and social developments. The implications of these findings can help design policies that encourage transparency, accountability, and citizen participation in political processes, creating a stronger foundation for future democratic development.

Keywords: *Dynamics, Political Dynasty, Indonesia*

Pendahuluan

Kata Yunani "politik" berasal dari kata "Polistai", yang berarti unit masyarakat atau negara yang mampu mengurus dirinya sendiri, dan "Taia", yang berarti pekerjaan atau aktivitas.

Oleh karena itu, politik selalu berkaitan dengan keinginan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keinginan individu

tertentu.¹ Politik mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok, seperti partai politik, lembaga masyarakat, dan individu. Ini mencakup segala aspek manajemen dan pengaturan umum masyarakat.

Ketika kata "kekuasaan" digunakan bersamaan dengan kata "politik", ada banyak definisi yang berbeda tentang apa itu kekuasaan. *John R. Schemerhorn dan Niccolò Machiavelli* mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu atau membuat peristiwa tertentu terjadi seperti yang diinginkan penguasa. Pengaruh positif dan hubungan yang saling mendukung sangat penting dalam perspektifnya. Metode ini, bagaimanapun, berbeda dengan teori Machiavelli, yang menganggap kekejaman sebagai alat yang dapat digunakan secara strategis untuk mempertahankan kekuasaan.²

Menurut Machiavelli, kekuatan yang kuat membutuhkan

kebijaksanaan saat menggunakan kekerasan. Menurutnya, lebih baik seorang penguasa ditakuti daripada disayangi. Dia berpendapat bahwa rasa takut dapat membantu mempertahankan kehormatan, keagungan, dan kesatuan penguasa. Machiavelli menyarankan agar pusat kekuasaan digunakan untuk mengendalikan rasa takut. Pusat-pusat kekuasaan harus memiliki kemampuan untuk memaksa orang untuk tunduk dan patuh. Oleh karena itu, kelemahan dan ketergantungan memastikan kelangsungan hidup negara. Teori Machiavelli menunjukkan perspektif realistis tentang dinamika kekuasaan, di mana elemen seperti dominasi, rasa takut, dan kebijakan dianggap penting untuk mempertahankan kekuasaan penguasa. Meskipun pendapatnya kontroversial, ia menyatakan bahwa kekejaman dapat menjadi alat penting untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan jika digunakan dengan bijak.

¹ Wardoyo, "Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Kaum Rohingya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman," *Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta* (2017), accessed December 4, 2023. Hlm 2.

² Nur Hidayati, "Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia," *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 10, no. 1 (March 1, 2014), accessed December 4, 2023. hlm 2.

Dinasti politik adalah salah satu jenis penyalahgunaan kekuasaan politik yang sering terjadi. Dinasti politik adalah cara kuno untuk mempertahankan kekuasaan yang bergantung pada keturunan segelintir orang.³ Dalam artikelnya yang berjudul "Pilihan Indonesia 2009: Populisme, Dinasti, dan Konsolidasi Sistem Kepartaian", Marcus Mietzner (2009) menunjukkan bahwa dominasi dinasti dalam politik Indonesia semakin menguat. Peneliti tersebut berpendapat bahwa praktik dinasti politik merugikan demokrasi, terutama karena dapat melemahkan kontrol pemerintah, yang merupakan bagian penting dari sistem pengendalian dan keseimbangan demokrasi.

Dalam politik modern, dinasti politik sering digambarkan sebagai jenis elit politik yang didasarkan pada kekerabatan, perkawinan, atau hubungan keluarga. Akibatnya, beberapa pengamat politik menggambarkan sebagai jenis oligarki politik di mana kelompok elit yang memiliki hubungan darah atau

keluarga memegang kekuasaan. Praktik ini menunjukkan bagaimana orang-orang tertentu dapat memperoleh kekuasaan politik, merusak prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan representasi yang adil dan partisipasi publik yang luas.

Sulit untuk menerapkan demokrasi karena dinasti politik berfokus pada perebutan kekuasaan di tingkat lokal dan nasional. Penumbuhan dinasti politik, terutama di tingkat daerah, bergantung pada aturan dan peran partai politik. Oligarki dalam struktur partai politik menjadi faktor utama yang menyebabkan proses pencalonan dan pencalonan tidak berjalan sesuai dengan etika.⁴ Tidak adanya undang-undang yang memadai untuk membatasi dinasti politik telah menyebabkan fenomena ini menjadi lebih luas dalam konteks pilkada. Meskipun UU No. 1/2015 tentang Pilkada bertujuan untuk membatasi dinasti politik dengan melarang konflik kepentingan, upaya ini belum sepenuhnya berhasil. Sesuai dengan Pasal 7 huruf q, warga negara

³ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (October 30, 2017): 113.

⁴ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (October 30, 2017): hlm 112.

Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana saat ini.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut, ada penjelasan menyeluruh tentang pihak-pihak yang dianggap memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Konflik kepentingan ini dapat berasal dari hubungan darah, ikatan perkawinan, atau garis keturunan satu tingkat di atas, di bawah, atau di samping petahana. Namun, ada pengecualian, yaitu dalam kasus di mana penundaan terjadi selama satu masa jabatan. Meskipun peraturan ini diharapkan dapat mengurangi praktik dinasti politik, implementasi mereka memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masalah yang berkaitan dengan dinasti politik di arena Pilkada.

Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

No.33/PUU-XIII/2015, yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf R UU No. 8 Tahun 2015, terjadi perubahan. Menurut MK, keputusan ini dibuat karena ada pelanggaran terhadap Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang untuk tidak berperilaku dengan cara yang diskriminatif. Dengan demikian, praktik politik dinasti diakui dan dijamin oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hak asasi manusia.⁵

Kekhawatiran bahwa pengendalian pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit disebabkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui praktik politik dinasti. Mungkin ada lebih banyak dinasti politik dalam sistem politik karena keputusan ini memberikan legitimasi hukum untuk praktik dinasti. Karena praktik ini dianggap sebagai hak asasi manusia, ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan pemusatan kekuasaan dalam keluarga. Akibatnya, hasil dari

⁵ Farida Azzahra and Indah Fitriani Sukri, "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah:

Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi," *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (January 31, 2022): hlm 107.

keputusan MK tersebut dapat menyebabkan praktik dinasti politik berkembang, yang pada akhirnya akan merusak keadilan dan demokrasi dalam proses politik Indonesia.

Partisipasi kritis masyarakat sebagai pemilih sangat penting untuk demokrasi yang sehat. Sangat penting bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada undang-undang dan struktur politik, tetapi juga pada kualitas pemilih. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat yang kritis dan berpengetahuan luas sangat penting. Karena itu, demokrasi yang efektif tidak hanya membutuhkan sistem formal, tetapi juga membutuhkan pemilih yang dapat memilih dengan benar dan terinformasi.⁶

Pemilih kritis bukan hanya hak tetapi juga tanggung jawab untuk memperkuat demokrasi. Ini dapat dilihat dari tingkat kualitas pemilih yang dapat mengevaluasi program dan visi kandidat dengan cermat, menyaring informasi politik dengan bijak, dan memahami dampak pilihan mereka terhadap keberlangsungan sistem demokrasi. Karena kesadaran akan tanggung jawab ini, demokrasi

akan menjadi lebih terbuka, lebih sadar, dan lebih responsif terhadap keinginan rakyat. Dengan demikian, dinasti politik yang tidak berhenti akan mengganggu hak-hak rakyat.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mempelajari latar belakang munculnya dan perkembangan dinasti politik di Indonesia dari era Orde Baru hingga reformasi. Selain itu, artikel ini juga mempertimbangkan bagaimana dinamika perjalanan dinasti politik di Indonesia seharusnya berkembang di masa depan untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.

Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang mereka pilih, "Dinamika Perjalanan Dinasti Politik di Indonesia." Berikut ini adalah daftar penelitian tersebut:

Pertama, artikel yang diterbitkan oleh Agus Dedi di Jurnal Moderat pada tahun 2022 berjudul

⁶ Hidayati, "Dinasti Politik Dan Demokrasi

Indonesia.” ORBITH VOL. 10 NO. 1 MARET
2014 : 18 – 21 hlm 19.

"Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi" mencoba memecahkan masalah politik dinasti di Indonesia dari sudut pandang demokrasi. Penulis menyimpulkan bahwa partai politik hanya digunakan sebagai kendaraan politik, yang pada akhirnya akan menghambat peran dan cita-cita partai tersebut karena partai politik hanya melihat cara memperoleh kekuasaan. Karena fokusnya hanya pada popularitas dan kekayaan kandidat yang menang, rekrutmen kader partai politik gagal.⁷ Penelitian ini berbeda dari penelitian Agus Dedi karena penelitian ini berfokus pada sejarah dan perkembangan dinasti politik di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada dinasti politik dari sudut pandang demokrasi.

Kedua, Martien Herna Susanti menulis artikel untuk Jurnal Pemerintahan dan Masyarakat Madani pada tahun 2017 berjudul "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia", yang membahas bagaimana dinasti politik memengaruhi pemilihan presiden di Indonesia. Penulis sampai pada

kesimpulan bahwa karena jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik yang bergantung pada pendekatan politik keluarga, orang-orang di luar dinasti tidak dapat terlibat dalam rekrutmen politik. Demokrasi pada dasarnya membutuhkan konsolidasi demokratis, dan lingkungan yang mendukung demokratis juga diperlukan.⁸ Penelitian Martien Herna Susanti berbeda dari penelitian ini karena penelitian pertama melihat dampak dinasti politik terhadap pilkada secara langsung. Namun, fokus penelitian ini adalah bagaimana dinasti politik berkembang dalam demokrasi Indonesia.

Ketiga, "Dinasti Politik dalam Pilkada dan Otonomi Daerah: Kajian terhadap Dinamika Pilkada 2020" adalah artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Terekam Jejak oleh Purwanto Putra dan Roby Rakhmadi. Dalam artikel tersebut, penulis membahas perbandingan politik dinasti di beberapa negara, efek dan konsekuensi dari fenomena dinasti politik, serta keterkaitan dinasti politik dengan pilkada dan otonomi

⁷ Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal MODERAT* Vol 8, No 1 (Februari 2022).

⁸ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia," *Jurnal of Government and Civil Society* Vol 1, No 2 (September 2017).

daerah. Artikel tersebut diakhiri dengan tinjauan sikap politik terhadap dinasti politik. Penulis kemudian mencapai kesimpulan bahwa dinasti politik menyebabkan konflik politik antara para elit politik yang bersaing ketika mereka kalah dalam pilkada dan tidak menerima hasilnya. Situasi ini juga dapat mendorong masyarakat akar rumput, atau masyarakat bawah, untuk terlibat dalam konflik, dan bahkan dapat menyebabkan mobilisasi massa sebagai hasil dari perselisihan di tingkat elit.⁹ Sementara penelitian Purwanto Putra membandingkan dinasti politik di berbagai negara, penelitian ini hanya membahas dinamika perkembangan dinasti politik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Kelembagaan Partai Politik dalam Aspek Demokrasi

Salah satu komponen demokrasi suatu negara adalah organisasi partai politik. Partai politik adalah pilar utama demokrasi karena berfungsi

sebagai cara untuk mengumpulkan dan menyampaikan kepentingan rakyat, yang kemudian direalisasikan dalam proses politik menjadi kebijakan negara. Oleh karena itu, agar partai politik dapat melakukan fungsi terbaiknya, diperlukan kelembagaan partai politik yang baik dan akuntabel.

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand, pelembagaan partai politik dapat dievaluasi dalam empat cara: sistem, nilai, otonomi, dan citra publik.¹⁰ Sebuah partai politik yang baik memiliki struktur kepemimpinan internal yang transparan dan demokratis, sistem pencatatan keuangan yang akuntabel, dan penegakan etika dan disiplin bagi anggota dan kader partai. Hal ini penting untuk mencegah munculnya aktivitas politik yang berkaitan dengan uang dan praktik korupsi internal partai, yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik partai. Lembaga partai politik juga melakukan pendidikan politik dan

⁹ Purwanto Putra dan Roby Rakhmadi, "Dinasti Politik dalam Pemilu dan Otonomi Daerah: Kajian tentang Dinamika Pemilu dan Tahun 2020," *Jurnal Terekam jejak* Vol 1, No 1.

¹⁰ Dwi Windyastuti, "Politik Representasi Perempuan: dari Representasi Formalistic Ke

Representasi Substantif", makalah disajikan pada workshop Peran Politik Perempuan oleh Center for Religious and Community Studies (CRCS), Surabaya, 5 November 2009, hal 118.

kaderisasi konstituen dan anggota. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, partai politik yang kuat dan berbasis anggota harus mengembangkan pendidikan politik yang signifikan.

Surbakti berpendapat bahwa sebuah partai politik dianggap telah melembaga secara sistem jika ia menjalankan fungsinya hanya berdasarkan AD/ART yang dirumuskan secara menyeluruh. Titik terlemah partai politik Indonesia adalah kekurangan sistem. Tingkat sistemik sebagian besar partai politik sangat rendah, termasuk yang telah memenuhi ambang batas elektoral, terutama karena peran pemimpin partai lebih penting daripada kedaulatan anggota dan kepentingan partai sebagai organisasi. Pemimpin partai politik tidak selalu buruk. Jika seorang pemimpin menggunakan karismanya untuk mempertahankan

kepemimpinannya, hasilnya akan buruk.¹¹

Sebagian besar partai politik di Indonesia tetap berkonsentrasi pada mendapatkan popularitas dan kesuksesan cepat, mengabaikan ideologi dan platform jangka panjang yang memungkinkan mereka untuk menjual pragmatisme sebagai produk politik kepada masyarakat.¹²

Pada saat ini, keputusan yang dibuat oleh partai politik tidak selalu dipengaruhi oleh suara dan kepentingan pendukungnya; lebih sering, keputusan yang dibuat oleh lingkaran elit politik di tingkat pusat.¹³ Selain itu, Arie Sujito menyatakan bahwa di tengah reformasi, beberapa partai politik terus bergantung pada budaya feodal dan praktik pragmatis yang menghalalkan segalanya. Menurutnya, ketika partai politik dihiasi dengan hubungan kekeluargaan atau dinasti dengan menarik garis keturunan dalam operasinya, hal

¹¹ Novi Winarti dan Nazaki, "Problematisasi Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 4, No 1 (Agustus 2019): hal 119.

¹² Joan Richart Angulo, "Desentralisasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia", makalah disampaikan

pada Policy Forum: Desentralisasi dan Sistem Kepartaian oleh MAP UGM, Yogyakarta, (10 Agustus 2010): 119.

¹³ Joan Richart Angulo, "Desentralisasi dan Sistem".

ini semakin kuat. Dalam kebanyakan kasus, keputusan strategis yang dibuat oleh partai politik bergantung pada preferensi tingkat atas, mengabaikan keinginan kelompok bawahan. Sebagai contoh, selama era otonomi daerah, ada perselisihan antara dewan pimpinan pusat (DPP) dan dewan pimpinan daerah (DPD). Pengurus daerah sering menentang keputusan DPP karena DPD biasanya dipaksa untuk "mengamankan" keputusan DPP meskipun tidak sesuai dengan keadaan lokal.¹⁴

Pada umumnya, masyarakat hanya tahu tentang partai politik dari tokoh-tokohnya. Selain itu, partai politik yang baru dibentuk memiliki kemampuan untuk menanamkan identitas partai mereka kepada masyarakat melalui penggunaan simbol seperti warna dan gambar, serta membandingkannya dengan visi dan misi partai tersebut.¹⁵

Karena partai politik berfungsi sebagai alat bagi warga

negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, mereka merupakan pilar demokrasi. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik dua arah antara pemilih dan pemerintah, memungkinkan mereka untuk menyampaikan dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Partai politik berkomunikasi dengan pemerintah tentang aspirasi pemilih dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada konstituen. Kelembagaan partai politik yang efektif dan akuntabel sangat penting untuk menjamin tingkat demokrasi yang baik. Partisi politik harus memiliki sistem dan mekanisme internal yang demokratis, transparan, dan inklusif. Salah satu contohnya adalah pemilihan internal yang terbuka dan berkala. Partai politik juga harus mengembangkan kepemimpinan kolektif daripada kepemimpinan individu. Oleh karena itu, kebijakan partai adalah

¹⁴ Arie Sujito, "Mencari Jalan Pembaharuan artai politik dan Komunikasi Politik Konstituen", Modul Pendidikan Politik: Manajemen

Konstituen, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung fuer die Freiheit, 2011), hal. 128

¹⁵ Joan Richart Angulo, "Desentralisasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia",

pilihan yang dibuat oleh kelompok orang, bukan oleh satu orang. Ini akan mencegah tindakan sewenang-wenang. Selain itu, partai politik harus memiliki program dan ideologi yang jelas untuk digunakan sebagai pedoman perjuangan politiknya. Program dan ideologi ini penting untuk menjaga partai tetap konsisten dan mempertegas identitas dan posisi politiknya di masyarakat.

2. Wajah Dinasti Politik di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 menunjukkan wajah dinasti politik Indonesia. Sebagian besar calon kepala daerah yang dipilih oleh partai politik memiliki hubungan keluarga dan kerabat dengan pemimpin partai politik pusat. Di Indonesia, istilah "dinasti politik" mengacu pada keadaan di mana anggota keluarga pejabat politik senior menduduki posisi politik penting secara turun-temurun.¹⁶ Selain itu, keberadaan dinasti politik sejak era Orde Baru,

termasuk keluarga Cendana, adalah bukti nyata bahwa dinasti politik dapat memengaruhi demokrasi Indonesia.

Pasca-Orde Baru 1998 menandai awal dinasti politik Indonesia. Dinasti politik Indonesia dari pasca-Orde Baru hingga saat ini memiliki banyak wajah, seperti:

a. Dinasti politik keluarga besar Soeharto (Keluarga Cendana)

Dinasti politik Keluarga Cendana adalah istilah yang merujuk pada fenomena anggota keluarga besar mantan presiden Soeharto yang mendominasi atau menduduki banyak jabatan politik di Indonesia pasca-lengsernya Soeharto pada tahun 1998.

Beberapa anggota Keluarga Cendana yang terjun ke dunia politik pasca-Orde Baru diantaranya:

- 1) Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) adalah anak sulung Soeharto.

¹⁶ Alvina Alya Rahma et al, "Pengaruh Dinasti Politik terhadap Perkembangan Demokrasi

Pancasila di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 6, No.1 (Juni 2022): 2260.

Pada tahun 2008, ia mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur, tetapi kalah.

- 2) Sigit Harjojudanto, ia adalah menantu Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan selama pemerintahan Gus Dur dan Megawati.
- 3) Siti Hediati (Titiek) adalah anak ke-4 Soeharto. Pada tahun 2018, ia kalah dalam pencalonan wakil gubernur Jawa Barat.
- 4) Tommy Soeharto merupakan putra bungsu Soeharto. Ia mendirikan Partai Berkarya. Pada 2009-2014, Tommy menjabat sebagai anggota DPR mewakili Partai Berkarya.
- 5) Partai Berkarya Partai ini didirikan oleh Tommy Soeharto pada 2006. Partai ini pernah

mendapatkan 14 kursi di DPR pada Pemilu 2009.

Berbagai upaya politik oleh Keluarga Cendana ini menuai kontroversi dan kecaman dari berbagai kalangan. Mereka dinilai masih berusaha memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan keluarga Soeharto untuk kepentingan politik.

b. Hamengkubuwono X

Ia telah menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 periode berturut-turut sejak tahun 1998. Hamengkubuwono X merupakan anggota keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

c. Dinasti politik keluarga Ir. Soekarno

Dinasti politik Keluarga Soekarno merujuk pada keterlibatan anak dan cucu dari presiden pertama RI, Soekarno, di dunia politik Indonesia. Beberapa anggota keluarga Soekarno yang menjadi bagian dinasti politik antara lain:

- 1) Megawati Soekarnoputri merupakan anak pertama Soekarno. Ia pernah menjabat sebagai wakil presiden pada era Gus Dur dan kemudian menjadi Presiden RI kelima menggantikan Gus Dur dari tahun 2001-2004.
 - 2) Puan Maharani adalah cucu Soekarno sekaligus anak sulung Megawati. Saat ini Puan menjabat sebagai Ketua DPR RI 2019-2024. Puan juga pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada era pemerintahan SBY.
 - 3) Guruh Soekarnoputra merupakan anak ke-5 Soekarno. Ia sempat mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) meski kemudian partai ini dibubarkan.
 - 4) Rachmawati Soekarnoputri adalah anak bungsu Soekarno. Meski tidak terlalu aktif secara politis, namun Rachmawati kerap memberi dukungan kepada partai-partai atau kandidat politik tertentu.
 - 5) Setelah Partai Demokrasi Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto dibubarkan, Megawati Soekarnoputri mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999.
- Dapat dilihat bahwa bekas pemimpin Indonesia, Soekarno, telah membentuk sebuah dinasti politik melalui keterlibatan anak cucunya di berbagai jabatan politik penting di Indonesia.
- d. Dinasti Politik keluarga SBY**
- Dinasti politik dari Keluarga Susilo Bambang Yudhoyono belum sekuat dinasti-dinasti politik lainnya di Indonesia. Namun

demikian, ada beberapa anggota keluarganya yang mulai terjun ke dunia politik, yaitu:

- 1) Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas, adalah putra sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono. Ia kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
- 2) Agus Harimurti Yudhoyono adalah putra kedua Yudhoyono. Ia pernah maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, namun harus mengakui kekalahan. Sebelumnya Agus pernah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2015-2020.
- 3) Partai Demokrat didirikan oleh Yudhoyono dan para pendukungnya ketika Yudhoyono masih

menjabat presiden pada 2001. Partai ini sempat memenangkan Pemilu 2009 dan 2014 saat Yudhoyono masih menjadi presiden.

- 4) Bobby Arifianto Yudhoyono merupakan adik kandung dari SBY. Meski Bobby sendiri tidak terjun langsung di politik, namun ia dikenal sangat vokal dalam mendukung kebijakan-kebijakan Partai Demokrat maupun pemerintahan SBY.

Jadi meski belum sepenuhnya solid, namun Keluarga Yudhoyono menunjukkan formasi dinasti politik melalui Partai Demokrat dan keterlibatan anak-anak SBY dalam jabatan-jabatan politik strategis.

e. Dinasti politik keluarga Jokowi

Dinasti politik era Jokowi menimbulkan perhatian karena adanya

keterlibatan politik keluarga Jokowi. Dalam konteks era Jokowi di Indonesia, institusi politik menjadi topik perdebatan yang penting. Banyak partai politik yang mengkritik politik keluarga yang terkait dengan intervensi keluarga Jokowi. Ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan dinasti politik pada masa Presiden Jokowi:

- 1) Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak tertua Presiden Jokowi terpilih sebagai Wali Kota Solo untuk periode 2021-2026 dalam Pilkada 2020. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Solo.
- 2) Bobby Afif Nasution merupakan suami dari Kahiyang Ayu, anak bungsu Presiden Jokowi. Bobby terpilih jadi anggota legislatif DPR RI periode 2019-2024 dari

Partai NasDem mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara.

- 3) Kaesang Pangarep putra dari Presiden Jokowi cepat dilantik menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI).
- 4) Gibran Rakabuming mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada tahun 2023.

3. Analisis Keberadaan Dinasti Politik di Indonesia dalam Aspek Demokrasi

Dinasty politik adalah ketika seorang pemimpin atau penguasa berusaha menempatkan anggota keluarga dan kerabat mereka di posisi penting dalam pemerintahan, terutama di tingkat lokal. Konsep ini terkait erat dengan politik tradisional, di mana dinasti politik dibangun berdasarkan kekuatan dan kontrol atas pemerintahan. Membangun kerajaan politik yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif adalah tujuan utamanya.¹⁷

¹⁷ Adelia Fitri, "Dinasti Politik Pada Pemerintahan Di Tingkat Lokal," *KEMUDI: Jurnal Ilmu*

Pemerintahan 4, no. 1 (September 8, 2019): hlm 93.

Pendapat Mosca, seperti yang dijelaskan oleh Heryanto (2019: 210),¹⁸ menyoroti bahwa munculnya dinasti politik dapat dikaitkan dengan kecenderungan para pemimpin politik untuk memberikan kekuasaan politik kepada generasi berikutnya atau bahkan kepada mereka yang berada di bawah mereka.

Menurut pandangan ini, pewarisan posisi kekuasaan politik terjadi melalui mekanisme pembukaan posisi politik yang memungkinkan para elit politik mengalihkan kendali politik kepada keluarga atau keturunannya, seringkali melalui pemilihan atau penunjukan ke posisi strategis yang memainkan peran penting dalam pemerintahan. Keluarga politik memiliki peluang untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaan mereka dalam jangka panjang dengan membuka posisi politik ini. Faktor penting dalam proses ini adalah posisi politik yang dapat diwariskan. Ketika mereka memegang kekuasaan,

para elit politik biasanya menggunakannya untuk mengatur jalur suksesi bagi anggota keluarga atau keturunan mereka. Ini dapat menghasilkan dinasti politik lokal dan nasional, membentuk jaringan kekuasaan dengan hubungan keluarga dalam politik.

Pemahaman ini menunjukkan dinamika politik yang rumit, di mana nepotisme dan pewarisan kekuasaan menjadi komponen penting dari sistem politik saat ini. Pandangan Mosca menunjukkan bahwa dinasti politik bukan hanya fenomena lokal tetapi juga strategi umum yang digunakan oleh para politisi untuk mempertahankan kendali atas proses politik di suatu negara.

Dinamika politik di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pemilihan anggota keluarga dan kerabat dekat untuk posisi penting. Ini dapat menghasilkan jaringan kekuasaan yang kuat di sekitar penguasa dan keluarganya, yang memungkinkan mereka mengontrol semua aspek pemerintahan. Untuk

¹⁸ Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu*

Pemerintahan 8, no. 1 (February 28, 2022): hlm 96.

mempertahankan kekuasaan, dinasti politik membuat sistem di mana kepentingan satu sama lain dipertahankan. Proses sosial dan ekonomi sebuah komunitas dapat sangat dipengaruhi oleh dinasti politiknya. Hubungan politik dan keluarga dapat memengaruhi pembagian sumber daya dan peluang, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dinasti politik bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaan; mereka juga dapat berdampak pada masyarakat secara keseluruhan dan strukturnya.

Terlepas dari asal-usul istilah demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani dan berarti "pemerintahan oleh rakyat" atau "kekuasaan oleh rakyat," interpretasi ini mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang otoritas tertinggi. Dua komponen utama terdiri dari kata "demokrasi", "demos", yang berarti rakyat, dan "kratos", atau "kratein", yang berarti kekuasaan

atau pemerintahan. Menurut Miriam Budihardjo (1986), kata "demokrasi" secara literal berarti rakyat memegang kendali atas pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Selain itu, sistem pemilihan umum yang bebas adalah bagian penting dari demokrasi, karena warga dapat memilih wakil mereka sendiri untuk pemerintahan.¹⁹

Dalam praktiknya, demokrasi dapat memiliki banyak bentuk, termasuk demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung melibatkan partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan, sedangkan demokrasi perwakilan melibatkan pemilihan perwakilan untuk membuat keputusan atas nama rakyat. Keduanya memiliki tujuan utama untuk membuat rakyat terlibat dalam proses politik dan memberikan hak kepada warga

¹⁹ Nur Hidayati, "DINASTI POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA," *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 10,

no. 1 (March 1, 2014), accessed December 4, 2023, hal 357.

negara untuk menyuarakan pendapat dan kepentingan mereka. Demokrasi juga mengandung prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan berbicara. Demokrasi juga berarti bahwa hak-hak setiap orang dilindungi dan bahwa warga negara harus terus terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Karena konstitusi kita menekankan hak setiap warga negara untuk memilih dan berpartisipasi dalam pemilihan, istilah "dinasti politik" seharusnya tidak relevan dalam sistem demokrasi. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah bahwa negara adalah milik seluruh rakyat, dan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah hak yang sama untuk semua warga negara. Oleh karena itu, tidak masuk akal bahwa karena alasan konstitusi dan demokrasi, dinasti atau keluarga tertentu mengontrol kehidupan politik. Konsep demokrasi menekankan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memilih, dan mereka juga

memiliki kemungkinan untuk dipilih sesuai dengan kemampuan dan dukungan masyarakat mereka. Konsep ini menekankan bahwa negara ini adalah milik semua orang, bukan hanya milik keluarga atau kelompok tertentu. Ironisnya, politik Indonesia masih menggunakan kebiasaan politik dinasti yang terus berkembang. Sistem politik dinasti lebih cenderung bergantung pada kepentingan pribadi daripada menilai kemampuan setiap orang, yang merusak dasar demokrasi kita. Banyak dinasti politik di Indonesia adalah fenomena yang mengkhawatirkan dan dapat dianggap sebagai ancaman besar. Fenomena ini mungkin menghalangi kemunculan pemimpin hebat. Itu juga dapat memicu tirani baru.

Pada masa Orde Baru, dinasti politik di Indonesia mulai muncul, ketika dominasi partai Golkar dan kekuatan hegemonik pemerintah memengaruhi struktur politik negara. Pengaruh Golkar menjadi begitu kuat sehingga lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya mengawasi pemerintah

menjadi sangat lemah. Lembaga-lembaga ini gagal melaksanakan fungsi pengawasan mereka, meskipun seharusnya menjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan hegemoni Golkar, dinasti politik dapat berkembang. Kekuasaan politik dan kontrol telah sangat tersentralisasi, dan segelintir elit politik memiliki banyak kekuatan. Akibatnya, lembaga perwakilan rakyat kurang efektif dalam mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Pluralisme politik dibatasi oleh dominasi satu partai dan suara-suara independen sulit muncul.

Dalam konteks ini, dinasti politik merupakan realitas yang merugikan demokrasi Indonesia. Mereka menghambat partisipasi politik yang sehat, kebebasan berbicara, dan transparansi. Untuk menurunkan hegemoni politik dan memperkuat lembaga pengawasan, sangat penting untuk membawa perubahan positif dalam dinamika politik Indonesia. Ini akan memberikan ruang bagi perspektif yang berbeda dan

mengurangi praktik politik dinasti yang merugikan demokrasi yang diharapkan. Praktek politik dinasti berdampak negatif pada politik dan ekonomi. Setiap pemerintahan memiliki kecenderungan untuk melibatkan orang-orang dekat dalam mendukung kebijakan ekonominya, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di banyak negara lain. Politik dinasti dapat merusak persaingan usaha yang sehat dalam hal ekonomi. Politik dinasti tidak hanya berdampak buruk secara politis, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi karena fakta bahwa orang-orang yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan ekonomi dapat menyebabkan ketidakseimbangan.²⁰

Kesimpulan

Dinasti politik sudah menjadi bagian dari dinamika politik di Indonesia sejak era orde baru hingga saat ini. Fenomena ini ditandai dengan banyaknya anggota keluarga

²⁰ *Ibid.*

elite politik yang menduduki jabatan-jabatan politik penting secara turun temurun. Tren ini berlangsung mulai dari keluarga Soekarno, Soeharto, Megawati, Yudhoyono, dan bahkan Jokowi.

Keterlibatan anggota keluarga elite politik ini menuai pro kontra di masyarakat. Meskipun begitu, kehadiran para penerus dinasti politik ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh seorang figur politik ternama yang memanfaatkan popularitasnya untuk kepentingan politik keluarganya. Di sisi lain, fenomena satu nama besar yang mendominasi jabatan politik juga dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi dan regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia.

Diperkirakan gelombang dinasti politik akan terus berlanjut seiring masih besarnya peluang para keturunan elite politik untuk mencoba peruntungan di dunia politik. Meski demikian, nasib dinasti politik juga bergantung pada sejauh mana elektabilitas dan kepercayaan publik yang masih melekat pada nama besar keluarga tertentu. Jadi dapat dikatakan dinasti politik mengalami pasang surut mengikuti dinamika

politik dan demokrasi Indonesia ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angulo, Joan Richart. *Desentralisasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, makalah disampaikan pada Policy Forum: Desentralisasi dan Sistem Kepartaian oleh MAP UGM, Yogyakarta. 10 Agustus 2010.
- Azzahra, Farida and Indah Fitriani Sukri. *Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi*. Jurnal JAPHTN-HAN Vol 1, No. 2022.
- Dedi, Agus. *Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi*. Jurnal MODERAT Vol 8, No 1. 2022.
- Fitri, Fitri. *Dinasti Politik Pada Pemerintahan Di Tingkat Lokal*. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No. 1. 2019.
- Hidayati, Nur. *Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial Vol 10, No. 1. 2014.
- Putra, Purwanto dan Roby Rakhmadi. *Dinasti Politik dalam Pemilukada dan Otonomi Daerah: Kajian tentang Dinamika Pemilukada Tahun 2020*. Jurnal Terekam jejak Vol 1, No 1.
- Rahma, Alvina Alya et al. *Pengaruh Dinasti Politik terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan Vol 6, No.1. 2022.

- Sujito, Arie. *Mencari Jalan Pembaharuan artai politik dan Komunikasi Politik Konstituen*. Modul Pendidikan Politik: Manajemen Konstituen, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung fuer die Freiheit, 2011).
- Susanti, Martien Herna. *Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia*. Journal of Government and Civil Society Vol 1, No. 2. 2017.
- Wardoyo. *Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Kaum Rohingya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman*. Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta. 2017.
- Winarti, Novi dan Nazaki. *Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi*. Jurnal Ilmu Pemerintah Vol 4, No 1. 2019.
- Windyastuti, Dwi. *Politik Representasi Perempuan: dari Representasi Formalistic Ke Representasi Subtantif*. Makalah disajikan pada workshop Peran Politik Perempuan oleh Center for Religious and Community Studies (CRCS), Surabaya, 5 November 2009.